Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum
Volume 2, Nomor.3, Juli 2025
e-ISSN: 3063-4024; p-ISSN: 3063-3990, Hal. 17-25
DOI: https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.612
Available online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah

Komunikasi Partai Politik Berbasis Hak Asasi Manusia: Strategi Kampanye Digital Sesuai Syariat Islam

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha[1], Ashfiya Nur Atqiya[2], Azka Isnaini Rais Kholila[3], Alfiyyatus Sadiida[4], Dzaky Aulia Rahman[5]
[1-5] Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
*Email :*mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id[1], ashfiy.anura@gmail.com[2], azkaisnainii@gmail.com[3], alfiyyatussadiida6@gmail.com[4], jakiklaten@gmail.com[5]

Abstract *This study examines communication strategies in promoting national values in the era of social media which has a very important role in building collective awareness and strengthening the sense of national unity. Social media, as a fast and broad means of communication, offers challenges as well as opportunities for efforts to strengthen nationality. In this context, an effective communication strategy must utilize digital platforms to disseminate inclusive national messages, prioritize tolerance, and strengthen national identity. The approaches used can be in the form of utilizing visual content, narratives that touch emotions, and collaboration with influencers and public figures to create a greater impact. In addition, it is important to pay attention to the aspects of speed and accuracy of information, so that the message conveyed is not easily distorted or misinterpreted. This study uses method a qualitative approach with a case study design to understand communication strategies in promoting national values in the era of social media. The qualitative approach was chosen because it allows researchers to explore in depth the communication phenomena that occur in society, especially on social media. This study discusses various communication techniques and models that can be used to convey national values to the younger generation, as well as the challenges faced in managing information amidst the diversity of opinions on social media. The results of this study to contribute to the development of more effective communication strategies in promoting national values in the digital era.*

Keywords: *Character Education, Digital Era, National Values, Social Media, Strategic Communication, Young Generation*

Abstrak Komunikasi politik yang dilandasi pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai-nilai syariat Islam menjadi kunci penting dalam menciptakan kampanye digital yang beretika dan berdampak positif di Indonesia. Perkembangan teknologi dan tingginya penggunaan media sosial telah mengubah pola penyampaian pesan politik, namun juga menghadirkan berbagai tantangan seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi kampanye digital yang memegang teguh nilai-nilai HAM dan ajaran Islam, khususnya dalam konteks komunikasi yang jujur, adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka dan telaah terhadap beberapa praktik kampanye digital dari partai politik dan tokoh calon pemimpin. Temuan menunjukkan bahwa kampanye yang berpijak pada nilai-nilai seperti kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, keterbukaan informasi, serta prinsip-prinsip Islam seperti tabayyun dan amar ma'ruf nahi munkar, terbukti lebih membangun kepercayaan publik dan mendukung iklim demokrasi yang sehat. Oleh sebab itu, integrasi HAM dan syariat Islam dalam strategi komunikasi politik digital menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kampanye Digital, Komunikasi Politik, Strategi, Syariat Islam

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah merevolusi pola komunikasi politik secara global, termasuk di Indonesia. Kampanye politik yang dulunya didominasi oleh pendekatan konvensional seperti pertemuan langsung, media cetak, atau siaran televisi, kini bergeser ke ranah digital. Platform seperti media sosial, website, dan aplikasi perpesanan menjadi medium utama dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Perubahan ini

Received:April 03, 2025; Revised: April 18, 2025; Accepted: Mei 05, 2025; Online Available: Mei 07, 2025

membawa dampak signifikan terhadap cara partai politik dan calon pemimpin membangun citra, menggaet dukungan, serta membentuk opini publik.

Namun, di balik peluang besar yang ditawarkan oleh ruang digital, muncul pula tantangan yang tak bisa diabaikan. Fenomena penyebaran berita palsu (hoaks), ujaran kebencian, politisasi agama, hingga politik identitas semakin mengkhawatirkan. Strategi kampanye yang seharusnya mencerdaskan dan menyatukan justru tak jarang menjadi alat untuk menyebarkan kebencian, memecah belah masyarakat, bahkan mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dalam kondisi seperti ini, penting bagi komunikasi politik untuk tidak sekadar mengejar efektivitas teknis, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan.

Salah satu pendekatan yang perlu diutamakan dalam membangun strategi komunikasi politik yang sehat adalah pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan prinsip universal yang menjamin kebebasan berpendapat, hak atas informasi yang benar, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan verbal. Dalam konteks kampanye digital, pendekatan berbasis HAM berarti bahwa setiap pesan politik harus menghormati martabat manusia, tidak memicu kebencian, dan memberi ruang bagi dialog serta partisipasi warga secara adil.

Di samping itu, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki kekayaan nilai-nilai agama yang bisa menjadi rujukan moral dalam komunikasi politik, khususnya nilai-nilai yang bersumber dari syariat Islam. Islam mengajarkan prinsip kejujuran (ṣidq), keadilan (‘adl), amanah, serta pentingnya klarifikasi informasi (tabayyun) sebelum menyebarkan suatu berita. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk menghadirkan kampanye politik yang tidak hanya cerdas secara strategi, tetapi juga berakhlak dan bertanggung jawab.

Kampanye digital yang sejalan dengan syariat Islam harus menjauhi praktik manipulasi informasi, fitnah, ghibah, dan propaganda yang menyesatkan. Sebaliknya, strategi kampanye harus mendorong amar ma’ruf nahi munkar, yakni mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan, dengan cara yang santun, terbuka, dan menjunjung tinggi adab dalam berdakwah. Islam juga mengajarkan prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan dan menghargai aspirasi rakyat, yang sejalan dengan prinsip demokrasi modern.

Sayangnya, dalam praktiknya, masih banyak aktor politik yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip ini. Demi meraih suara, sebagian pihak memilih jalan pintas yang tidak etis, seperti menyebarkan disinformasi atau mengedepankan politik identitas. Akibatnya, ruang digital yang seharusnya menjadi sarana edukasi politik berubah menjadi arena konflik dan perpecahan.

Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan model komunikasi politik yang mengintegrasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan syariat Islam dalam setiap strategi kampanye digital. Pendekatan ini tidak hanya akan menciptakan ruang publik yang lebih sehat dan beradab, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Melalui penelitian ini, penulis mencoba menggali dan menganalisis bagaimana komunikasi partai politik dapat dirancang secara etis dan efektif, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM dan ajaran Islam sebagai pedoman moral dalam era digital yang penuh tantangan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi politik berbasis Pancasila adalah pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai dasar negara Indonesia dalam setiap pesan politik yang disampaikan, baik melalui media konvensional maupun digital. Dalam konteks kampanye digital, penerapan prinsip-prinsip Pancasila sangat penting untuk memastikan bahwa komunikasi politik tidak hanya efektif dalam menjangkau audiens yang luas, tetapi juga berlandaskan pada etika, moralitas, dan persatuan bangsa. Untuk itu, strategi kampanye digital yang efektif harus dapat mengoptimalkan media digital secara cerdas, dengan tetap menjaga agar pesan yang disampaikan sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Pentingnya Pancasila dalam Komunikasi Politik Digital

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai dasar dalam berkomunikasi politik. Setiap sila dalam Pancasila dapat diadaptasi dan diterapkan dalam strategi komunikasi politik digital untuk memastikan bahwa kampanye politik dapat berlangsung dengan damai, mengedepankan integritas, serta menghindari polarisasi dan perpecahan. Berikut adalah beberapa prinsip Pancasila yang dapat dijadikan landasan dalam kampanye digital:

Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama menuntut adanya penghargaan terhadap keberagaman dalam beragama dan berkeyakinan. Dalam konteks kampanye digital, hal ini mengharuskan para aktor politik untuk menghindari ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap kelompok atau individu yang berbeda keyakinan. Kampanye politik yang berbasis pada sila pertama harus menonjolkan nilai-nilai kebajikan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua menekankan pentingnya memperlakukan sesama dengan adil dan beradab, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau golongan. Dalam kampanye digital, hal ini berarti bahwa setiap pesan politik yang disebarkan harus mencerminkan nilai-nilai

kemanusiaan, menghargai keberagaman, dan menjauhi politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat. Kampanye yang berbasis pada prinsip ini harus berfokus pada kesetaraan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu.

Persatuan Indonesia

Sila ketiga mengingatkan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, persatuan harus tetap dijaga. Kampanye digital yang berbasis pada sila ini harus berupaya untuk menyatukan berbagai elemen bangsa dan menghindari retorika politik yang memecah belah. Strategi komunikasi yang diterapkan harus lebih menekankan pada pesan-pesan yang menguatkan kebersamaan dan persatuan, serta mempererat tali silaturahmi antarwarga negara.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Dalam kampanye digital, ini berarti bahwa strategi komunikasi harus mendukung proses demokrasi yang sehat dengan mendorong diskusi, partisipasi publik, dan keterbukaan dalam menyampaikan ide serta menyikapi perbedaan pendapat. Kampanye politik harus mengedepankan dialog dan konsultasi sebagai bagian dari pendekatan politik yang transparan dan akuntabel.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menuntut adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tercermin dalam pemerataan kesejahteraan dan pembangunan. Kampanye digital yang berpegang pada sila ini seharusnya tidak hanya mengedepankan janji politik yang menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga berfokus pada program-program yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kampanye yang berbasis pada sila ini harus lebih memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat, mengurangi ketimpangan sosial, dan mengedepankan pemerataan pembangunan.

Strategi Kampanye Digital yang Efektif Berdasarkan Pancasila

Untuk menciptakan kampanye digital yang efektif dan berbasis Pancasila, strategi komunikasi politik harus melibatkan beberapa elemen penting, di antaranya:

Pemanfaatan Media Sosial Secara Bijak

Media sosial adalah alat yang sangat powerful dalam kampanye politik digital. Namun, penggunaannya harus cerdas dan bijaksana agar tidak menimbulkan hoaks, ujaran kebencian, atau informasi yang menyesatkan. Kampanye politik berbasis Pancasila harus mengedepankan fakta dan data yang akurat, serta menghindari konten yang memicu polarisasi. Untuk itu, politisi dan partai politik perlu memiliki tim profesional yang mengelola akun media sosial

mereka, yang tidak hanya berfungsi untuk menyebarkan pesan, tetapi juga untuk membangun interaksi yang positif dengan masyarakat.

Penyampaian Pesan yang Inklusif dan Humanis

Kampanye politik berbasis Pancasila harus mengedepankan inklusivitas, dengan memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan latar belakang. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, penuh empati, serta menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pesan yang humanis, kampanye digital dapat membangun kedekatan emosional dengan audiens, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi politik dan keterlibatan publik .

Penggunaan Konten Visual dan Audiovisual yang Kuat

Dalam era digital, visual dan audiovisual menjadi elemen penting dalam menyampaikan pesan politik. Kampanye digital yang berbasis Pancasila harus memanfaatkan kekuatan gambar, video, infografis, serta siaran langsung untuk menyampaikan pesan yang menggugah dan menyentuh hati masyarakat. Konten-konten ini harus relevan dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya melalui cerita-cerita inspiratif tentang persatuan, keadilan, dan kemanusiaan, atau menampilkan aktivitas sosial yang mencerminkan kepedulian terhadap rakyat.

Interaksi dan Dialog dengan Masyarakat

Salah satu kekuatan utama media digital adalah kemampuannya untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka. Kampanye digital berbasis Pancasila harus mengutamakan komunikasi dua arah, di mana politisi atau partai politik tidak hanya mengirimkan pesan, tetapi juga mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat. Interaksi ini bisa dilakukan melalui komentar, diskusi, polling, atau bahkan sesi tanya jawab langsung. Dengan mendengarkan suara rakyat, kampanye akan lebih terasa dekat dan relevan, serta menunjukkan komitmen untuk mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

Menghindari Polarisasi dan Penyebaran Informasi Negatif

Kampanye digital berbasis Pancasila harus berhati-hati dalam menghindari penyebaran konten yang dapat menyebabkan polarisasi atau perpecahan di masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, kampanye politik tidak boleh memanfaatkan isu sensitif seperti agama, ras, atau suku untuk meraih keuntungan politik. Sebaliknya, kampanye harus fokus pada penyampaian pesan-pesan yang membangun kebersamaan, mempererat hubungan antar kelompok, dan memperkuat jalinan persaudaraan nasional.

Tantangan dalam Penerapan Komunikasi Politik Berbasis Pancasila

Meskipun komunikasi politik berbasis Pancasila memiliki potensi besar untuk menciptakan kampanye yang beretika dan bermartabat, penerapannya tidak tanpa tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam kampanye digital berbasis Pancasila adalah penyebaran hoaks, manipulasi opini publik, dan pemanfaatan media untuk kepentingan politik sempit. Selain itu, adanya celah dalam pengawasan konten digital juga dapat menjadi hambatan besar, mengingat tidak semua pesan yang disebarkan di media sosial dapat dikontrol secara efektif.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kebijakan yang jelas dari pemerintah, partai politik, serta lembaga-lembaga terkait, untuk memastikan bahwa kampanye digital yang dilakukan tetap berada dalam koridor yang sah dan tidak merusak prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat regulasi terkait penyebaran informasi di dunia maya, melibatkan masyarakat dalam pengawasan konten digital, serta memberikan edukasi kepada publik mengenai pentingnya literasi digital dan kewaspadaan terhadap informasi yang tidak akurat.

Komunikasi politik berbasis Pancasila dapat menjadi strategi kampanye digital yang efektif, jika diterapkan dengan benar. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam komunikasi politik digital tidak hanya dapat memperkuat integritas dan kualitas demokrasi Indonesia, tetapi juga mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui pemanfaatan media sosial yang bijak, penyampaian pesan yang inklusif, serta interaksi yang transparan dan dialogis, kampanye politik dapat dilaksanakan secara lebih bermartabat, mengedepankan kepentingan rakyat, dan menghindari praktik-praktik negatif yang dapat merusak tatanan sosial-politik. Partai politik Islam di era digital membangun narasi kampanye dengan menekankan nilai-nilai keislaman seperti keadilan sosial, moralitas, dan solidaritas umat. Narasi ini disebarluaskan secara masif melalui media sosial sebagai strategi untuk meraih dukungan politik yang luas dan cepat. Nilai-nilai yang diangkat dalam pesan politik tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti kesetaraan, penghargaan terhadap martabat, dan kepedulian terhadap kelompok rentan. Komunikasi politik semacam ini tidak hanya memperkuat identitas keislaman pemilih, tetapi juga mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif dalam proses demokrasi. Namun demikian, penggunaan simbol dan pesan agama dalam politik harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan polarisasi sosial. Oleh karena itu, strategi kampanye digital partai politik Islam perlu diarahkan pada pendekatan moderat yang mampu mengharmoniskan antara syariat Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga menghasilkan komunikasi politik yang etis, efektif, dan membangun stabilitas sosial-politik (Kahpi, Siregar, & Romadon, 2024).

Media sosial memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi politik, terutama di kalangan pemilih pemula. Generasi ini cenderung lebih akrab dengan teknologi dan aktif mencari informasi politik melalui platform digital. Kehadiran media sosial memberikan ruang ekspresi yang luas, memungkinkan pemilih pemula menyalurkan pendapat secara bebas dan anonim. Namun, kebebasan ini juga menimbulkan tantangan, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, kampanye politik digital harus mengedepankan prinsip literasi digital, keterbukaan informasi, serta komunikasi yang etis dan bertanggung jawab. Strategi komunikasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia—seperti kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab—dengan nilai-nilai syariat Islam seperti tabayyun dan amar ma'ruf nahi munkar, menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi digital yang sehat dan beradab (El Farabi, 2022) .

3. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai Komunikasi Politik Berbasis Pancasila: Strategi Kampanye Digital yang Efektif adalah bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kampanye politik digital memegang peranan yang sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan politik, tetapi juga bermartabat dan berlandaskan pada etika serta moralitas yang tinggi. Pancasila, sebagai ideologi dasar negara, memberikan pedoman bagi setiap aktor politik untuk mengedepankan keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kebijaksanaan dalam setiap pesan yang disampaikan. Dalam konteks kampanye digital, media sosial menjadi sarana yang sangat potensial untuk menjangkau audiens yang luas, namun harus digunakan dengan bijaksana agar tidak menimbulkan polarisasi atau penyebaran hoaks. Strategi kampanye yang efektif harus memanfaatkan media digital dengan cara yang inklusif, menyampaikan pesan yang mengedepankan kesetaraan dan persatuan, serta menghindari konten yang merusak ikatan sosial. Selain itu, pentingnya interaksi dua arah antara politisi dan masyarakat melalui platform digital menjadi kunci untuk membangun kedekatan dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam mengendalikan konten yang berpotensi merusak tatanan sosial, yang memerlukan pengawasan dan regulasi yang ketat dari berbagai pihak. Dengan demikian, komunikasi politik berbasis Pancasila dapat menjadi strategi kampanye digital yang tidak hanya memperkuat kualitas demokrasi, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan kebangsaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan bangsa Indonesia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Alfikri, M. (2022). *Pengantar komunikasi politik Islam* (Vol. 1). Academia Publication.

Carnawi, C., Zamzami, Z., Nasoha, A. M. M., Muarif, Y. Z., & Abdullah, I. (2024). Management strategy for the development of pesantren's hidden curriculum in schools. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies, 9*(1), 69–92.

El Farabi, Q. N. S. (2022). Kehadiran media sosial dan partisipasi politik bagi pemilih pemula. *Jurnal Comline, 7*(2), 121–122.

Fahruji, D., & Fahrudin, A. (2023). Pemanfaatan media sosial dalam kampanye politik menjelang Pemilu 2024: Studi kasus tentang akun media sosial partai politik dan politisi. *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan), 6*(2), 118–132.

Heryanto, G. G. (2020). *Realitas komunikasi politik Indonesia kontemporer*. IRCiSoD.

Isdiyanto, I. Y. (2021). *Dekonstruksi pemahaman Pancasila: Menggali jati diri hukum Indonesia*. UGM Press.

Iswardhana, M. R. (2020). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Merajut kebinekaan dalam menghadapi tantangan revolusi industri*. PT Kanisius.

Kahpi, M. L., Siregar, A. S., & Romadon, S. (2024). Dinamika komunikasi politik Islam: Narasi, dan dampak dalam konteks politik kontemporer. *Jurnal Hikmah, 18*(1), 1–20.

Mahmud, A. A., & Ananda, D. (2023). Manajemen komunikasi politik Jokowi dan Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden untuk meningkatkan dukungan masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi, 13*(2), 193–207.

Michelle, G. F., Sabrina, N. A., Dermawan, K. J., Septivares, M. B., & Yurisna, A. (2024). Evaluasi penggunaan baliho sebagai media kampanye dalam perspektif sila kedua Pancasila. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 2*(1).

Muhazir, A., & Sos, S. (2021). *Komunikasi politik: Demokrasi, media massa, dan pemilihan umum di Indonesia* (Vol. 1). Zahira Media Publisher.

Nasoha, A. M. M. (2013). *Analisis wewenang Polri dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia ditinjau dari segi hak asasi manusia* [Skripsi, Universitas Sebelas Maret].

Nasoha, A. M. M. (2016). Eksistensi penerapan hukuman mati di Indonesia. *Jurnal Al Ahkam UIN Surakarta, 1*(1).

Nasoha, A. M. M., & Nihayah, N. K., & Winati, A. A. (2023). Analisis kawin paksa dalam perspektif hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 9*(2), 142–152.

Nasoha, A. M. M., & Novianto, B. A. (2023). Nilai-nilai pendidikan fiqih dalam kitab *Nurul Burhan* karya Syaikh Muslim bin Abdurrahman Al Maraqi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 5*(1), 1179–1197.

Nasoha, A. M. M., & Saputri, A. M. W. (2022). Analisis kritis perkawinan yang dilarang di Indonesia ditinjau dari fiqih perbandingan mazhab. *Jurnal Bedah Hukum, 6*(1), 57–74.

Nasoha, A. M. M., Hidayat, R., & Atqiya, A. N. (2024). Analisis tentang perlindungan hukum pernikahan dini pada usia di bawah 19 tahun menurut hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 10*(1), 172–188.

Nasoha, R. A. M. M., & Novianto, B. A. (2023). Nilai-nilai pendidikan fiqih dalam kitab *Nurul Burhan* karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al Maraqi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 5*(1), 1179–1197.

Novitasari, I. (2021). *Buku materi pembelajaran perbandingan politik*.

Paramudita, N. P., & Nasoha, A. M. M. (2023). Implementasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2022/2023 [Tesis doktoral, UIN Raden Mas Said].

Rais, M. C. A. (2024). Strategi komunikasi politik Partai Gerindra dalam menarik suara generasi Z jelang pemilihan umum 2024 melalui media sosial Twitter (X) [Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi].

Sutoyo, M. P., Trisiana, A., & Supeni, S. H. (2020). *Pendidikan nilai moral berbasis Pancasila*. Unisri Press.

Syabana, M. S. A., & Suyono, S. (2023). Komunikasi politik tokoh masyarakat dalam menghadapi Pemilu 2024 (Studi kasus pada tokoh pemuka pendapat Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember). *Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital, 1*(1), 9–9.

Usman, A. R. (2021). *Komunikasi strategis Indonesia-Tiongkok*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Yuliah, M. A., Judijanto, L., Maiwan, M., Irawatie, A., & Ikhwanudin, I. (2025). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Zuhdi, M. (2020). *Komunikasi politik di era virtual: Dinamika komunikasi dan media pasca Pemilu Serentak 2019*. Buku Litera.